

Agenda Literasi Media

*Oleh Muzayin Nazaruddin
Dosen Ilmu Komunikasi UII*

Artikel ini pernah dimuat di Harian Bernas Jogja, 17 Januari 2007

Tahun 2006 wajah pertelevisian kita ditutup dengan aroma tak sedap: jatuhnya korban-korban *smack down*. Lativi kemudian menghentikan tayangan *smack down* karena tuntutan masyarakat. Selesaikan masalah karena *smack down* sudah tidak ditayangkan? Belum, masih banyak hal yang harus kita perbincangkan.

Terlebih, jika kita mengajukan pertanyaan lugas: bagaimana wajah televisi kita pada tahun 2007 ini? Agar tidak sekadar 'kira-kira', kita harus menjawab pertanyaan ini dengan terlebih dahulu menengok wajah televisi yang telah berlalu. Asumsi dasarnya, sejarah tidak pernah merupakan retakan-retakan yang terpisah sama sekali, sebaliknya selalu merupakan gerak yang bertalian. Maka, gerak pertelevisian menunjukkan sebuah pola atau kecenderungan tertentu yang tetap akan diikuti sepanjang pola tersebut sejalan dengan eksistensi dasar televisi itu sendiri.

Dengan berbagai penyederhanaan, refleksi atas pertelevisian nasional bisa kita rangkum dalam beberapa hal. *Pertama*, problem 'content' siaran yang semakin sarat tiga hal: sadis, mistis, seksis. Dalam konteks ini, penghentian *smack down* sama sekali belum menyelesaikan masalah karena selain *smack down*, layar televisi kita masih dijejali tayangan-tayangan yang mengajarkan kekerasan, misalnya saja berita-berita kriminal yang semakin vulgar mengekspose kekerasan. Sama tidak mendidiknya, sinetron-sinetron mistis yang mengusung takhayul juga semakin baragam dan marak. Selain itu, seks sebagai muatan wajib masih terus bertahan sebagai program *primetime*, bisa kita lihat dari berbagai sinetron remaja yang diam-diam mengajarkan budaya pemujaan tubuh dan seks bebas.

Kedua, problem regulatif. Regulasi yang ada yaitu UU Penyiaran No. 32/2002 serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang disusun KPI masih terlalu umum, banyak celah, dan kurang memadai. Problem regulatif juga menyangkut perilaku penyelenggara penyiaran yang dengan seenaknya menerabas peraturan-peraturan tersebut. *Ketiga*, problem kesadaran bermedia di masyarakat kita yang masih sangat rendah.

Refleksi sederhana tersebut bisa menjadi titik berangkat bagi kita untuk segera bersiap: banyak agenda yang harus kita kerjakan. Untuk apa? Jelas, untuk mengurangi seminimal mungkin eksekusi buruk tayangan televisi di masyarakat, sekaligus mengontrol 'kinerja' televisi agar lebih sehat dan mendidik.

Terdapat dua pilar gerakan yang tidak bisa kita tinggalkan, *gerakan literatif* dan *gerakan regulatif*. Gerakan literatif berorientasi menciptakan masyarakat yang 'melek' media, mampu melakukan 'filtering' secara mandiri, baik personal maupun komunal, atas berbagai tayangan media, khususnya televisi. Gerakan regulatif mengarah pada pengelola televisi dan regulasinya, artinya bagaimana regulasi yang ada harus lebih menjamin kualitas tayangan televisi, membatasi produksi tayangan-tayangan hiburan 'sampah' yang meresahkan, serta bagaimana regulasi tersebut dipatuhi oleh para pengelola televisi.

Tulisan ini akan membahas pilar gerakan yang pertama, yaitu gerakan literatif. Pilar gerakan kedua, agenda regulatif, akan penulis jabarkan dalam tulisan tersendiri.

Gerakan Literatif

Akhir 2006, setelah korban *smack down* berjatuhan, para ahli tiba-tiba merasa perlu mengingatkan kembali pentingnya literasi media. Sayang, argumentasi ‘literasi smack down’ ini persis mengikuti alur ‘aktualitas’ pemberitaan media, ketika sudah tidak aktual lagi, hilang begitu saja. Saat ini, masyarakat – bahkan mungkin para ahli tersebut – mungkin sudah tidak mengingat-ingat lagi urgensi literasi media. Toh, *smack down* sudah tidak ditayangkan dan korban sudah tidak berjatuhan.

Jika satu saat terjadi lagi tindak kriminalitas, kenakalan remaja, ataupun tindak asusila karena menirukan tayangan televisi, lalu fenomena tersebut disorot lagi oleh media massa, pasti kita akan kembali ribut dan meneriakkan literasi media. Alhasil, melimpahnya informasi bukan membuat kita menjadi masyarakat informasi (*information society*), namun menjadi masyarakat kerumunan (*crowd society*) yang diombang-ambingkan informasi.

Berangkat dari pelajaran *smack down*, kita bisa mengajukan beberapa prinsip gerakan literasi media yang harus dipegang teguh. *Pertama*, literasi media adalah gerakan berkelanjutan, bukan insidental apalagi reaktif semata. Televisi memberondong masyarakat selama 24 jam, maka kita harus mengimbangnya dengan gerakan 24 jam. Literasi media adalah agenda rutin, ada kasus ataupun tidak.

Kedua, literasi media harus melibatkan berbagai kalangan secara lebih luas. Saat ini, literasi media masih elitis, sayup-sayup terdengar dari kampanye segelintir masyarakat yang peduli media, biasanya para akademisi komunikasi, sedikit insan pers yang kritis, serta aktifis LSM tertentu. Jelas, secara sosiologis, kekuatan ‘masyarakat media’ ini di hadapan masyarakat umum sangat lemah. Literasi media di sebuah sekolah akan jauh lebih efektif dengan dukungan penuh dan aktif dari para guru. Literasi media di pondok pesantren akan benar-benar diperhatikan para santri apabila ustad atau kyai mereka sendiri yang menggerakkan. Literasi media di sebuah masyarakat pedesaan akan jauh lebih berhasil ketika dilakukan oleh para kyai, ketua adat, ataupun pemimpin sosial di masyarakat tersebut. Artinya, kontinum keanggotaan imajinatif masyarakat peduli media harus kita perluas, tidak hanya digawangi oleh akademisi, insan pers, dan aktifis LSM, namun juga melibatkan secara aktif para pendidik, budayawan, pemimpin agama, pemimpin sosial, serta pemimpin pemerintahan di level *grassroot*.

Ketiga, keterlibatan insan pers dalam gerakan literasi media menjadi sangat signifikan. Kita bisa mengharapkan adanya kontrol media oleh media. Media cetak, khususnya koran harian, bisa mengambil peran penting dengan menjadikan literasi media sebagai agenda setting mereka. Hal ini bisa berwujud pemberitaan intensif tentang literasi media, pemberitaan yang semakin kritis terhadap tayangan-tayangan televisi, hingga penyediaan halaman khusus yang membahas acara-acara televisi secara kritis, tidak hanya menampilkan jadwal acara televisi-televisi nasional dengan sedikit sinopsis ala kadarnya. Apakah hal ini mungkin dilakukan? Sangat mungkin, dari segi pasar, pemuatan jadwal acara televisi dibarengi tulisan kritis yang memandu pembaca dalam menonton televisi tentu akan sangat dibutuhkan dan diminati pembaca.

Keempat, gerakan literasi media harus mulai berorientasi menciptakan masyarakat yang aktif mengontrol media. Memang, tahap pertama adalah membentuk pemahaman masyarakat akan pesan-pesan laten media sehingga mereka bisa melakukan filter informasi secara mandiri sesuai kebutuhan mereka. Dalam tahap ini, masyarakat masih pasif, membentengi diri sendiri dan lingkungannya dari terpaan buruk tayangan televisi. Tahap selanjutnya adalah menggerakkan masyarakat untuk turut aktif mengontrol tayangan-tayangan televisi. Langkah aktif bisa dimulai dari hal kecil, melayangkan protes personal ataupun komunal melalui KPI atau langsung kepada

media bersangkutan, hingga langkah yang lebih jauh dengan menempuh jalur hukum seperti mengajukan somasi. Kritisisme aktif masyarakat ini harus diagendakan sejak awal dalam gerakan literasi media. Pada akhirnya, *media watch* dilakukan langsung oleh masyarakat, bukan hanya oleh LSM *media watch*.

Sebagian ahli – didukung mati-matian oleh para penyelenggara televisi – khawatir, kontrol masyarakat yang berlebih atas media akan menodai kebebasan pers, berarti juga mencederai demokrasi. Pertanyaannya, dengan posisi televisi yang *powerfull*, menjadikan akumulasi modal sebagai satu-satunya kiblat dengan mengorbankan kepentingan publik, bagaimana publik bisa memperoleh hak-hak mereka? Dengan bahasa lugas: di mana letak demokrasi ketika satu pihak yang *powerfull* mengorbankan kepentingan dan suara banyak orang demi kepentingannya sendiri? Bukankah hal itu lebih mirip tirani minoritas?